

**KEMAMPUAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA
TOLONDADU II KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Moh. Abubakar Talalu¹, Sabriana Oktaviana Gintulangi²
STIA Bina Taruna Gorontalo
talalubakar221@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kemampuan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang difokuskan pada 3 indikator penelitian yaitu: komunikasi, koordinasi, dan kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi yang saat ini dilakukan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat dalam hal memediasi permasalahan belum sesuai dengan yang diharapkan dalam keberhasilan pembangunan disebabkan kepala desa belum bisa memediasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan, Koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat untuk menunjang keberhasilan pembangunan belum sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan terjadi tumpang tindih dalam memberikan pendapat, Kerja sama yang dilakukan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat belum berjalan dengan baik di karenakan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur desa yang tidak berkelanjutan.

Disarankan Perlunya komunikasi antara kepala desa dan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat harus ditingkatkan, serta kepala desa juga harus mampu meningkatkan pengetahuan dalam hal memediasi permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan pembangunan, Perlunya koordinasi kepala desa dalam memecahkan masalah yang ada untuk pelaksanaan pembangunan agar supaya pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan maksimal, Perlunya kerja sama kepala desa untuk bekerja sama dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat agar pembangunan yang ada di desa akan berjalan dengan baik seperti yang di harapkan.

Kata Kunci: Kemampuan, Kepala Desa, Pelaksanaan, Pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan

kearah kemajuan yang lebih baik dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta

hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada masa Orde Baru, pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara bertahap yaitu dengan dilaksanakannya Repelita yang diadakan berkesinambungan untuk memberikan arah pedoman, untuk mengembangkan Negara dan bangsa. Untuk pelaksanaan pembangunan itu, kemampuan serta perbaikan aparatur pemerintah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mengatur sumberdaya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tidak lain berangkat dari konteks empirik dan berpijak pada idealisme desentralisasi yang telah dibangun oleh para *funding father* Indonesia serta anjuran akademik yang berkembang secara global di muka bumi.

Dengan menyelesaikan sesuatu apabila dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan didukung oleh komponen-komponen lain, misalnya ada dukungan dari

masyarakat, sarana dan prasarana kondisi yang kondusif, dan lingkungan yang memungkinkan, maka pembangunan desa yang diprogramkan oleh pemerintahan dan yang diharapkan oleh masyarakat akan berjalan secara efektif, efisien serta maksimal.

Oleh sebab itu, apabila dukungan tersebut sudah memadai, maka harus terjalin hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang diidentikan sebagai Badan Perwakilan Masyarakat yang berada di tingkat Desa. Kepala desa sebagai badan pemegang jabatan tertinggi di tingkat desa harus melaksanakan peranan secara maksimal, agar program yang direncanakan dapat membuahkan hasil yang baik.

Kepala Desa selaku pimpinan pemerintah yang ada dalam ruang lingkup desa harus berperan aktif secara optimal sebagai seorang pelayan masyarakat, maupun sebagai seorang mediator yang bisa memediasi permasalahan dalam masyarakat mencakup ruang lingkup pemerintahan desa. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, Kepala Desa harus mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, karena dengan semangat dapat menentukan suksesnya pembangunan yang ada di desa, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap

terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan dan juga mampu memediasi atau menangani masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga tercipta kerukunan dalam masyarakat di desa.

Namun, kenyataannya di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kepala desa selaku pemerintah kurang berkomunikasi dengan kepala urusan pembangunan serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pelaksana pembangunan dalam memediasi permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki. Selain itu kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan pelaksana pembangunan serta masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur desa contohnya seperti pembangunan tanggul dan pembangunan jalan desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki sudah berjalan dengan baik namun masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pembangunan infrastruktur desa yang tidak berlanjut yang disebabkan kurangnya kerja sama antara kepala desa dengan pelaksana pembangunan serta masyarakat yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa.

PERMASALAHAN

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Kemampuan Kepala Desa Sebagai Mediator

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai Kemampuan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dilihat dari sisi teoritis dan praktis sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu administrasi serta dijadikan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama.

Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha menuturkan

pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi data. Adapun fokus dalam penelitian ini dalam meliputi komunikasi antara kepala desa dan pelaksana pembangunan dalam memediasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa; koordinasi antara kepala desa dan pelaksana pembangunan serta masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan; dan kerjasama antara kepala desa dan pelaksana pembangunan serta masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan akan terlaksana secara optimal.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Kemampuan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang meliputi:

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah komunikasi antara kepala desa dan pelaksana pembangunan dalam memediasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa.

Koordinasi

Koordinasi yang dimaksud dalam hal ini adalah koordinasi antara kepala desa dan pelaksana pembangunan serta masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik dan sesuai yang di harapkan.

Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini adalah kerja sama antara kepala desa dan pelaksana pembangunan serta masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan akan terlaksana secara optimal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian mengenai Kemampuan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan sejumlah informan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara kepala desa dengan pelaksana pihak pembangunan dan masyarakat. Dalam pembangunan desa koordinasi antara kepala desa dan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat sangatlah di butuhkan dikarenakan tanpa adanya koordinasi pembangunan yang ada di desa tidak akan berjalan sesuai harapan, maka dari itu kepala desa harus berkoordinasi dengan baik ke pelaksana pembangunan agar pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.

Hasil penelitian dilihat dari Koordianasi menunjukkan bahwa kepala desa melakukan koordinasi dengan cara berjenjangan dari pelaksana pembangunan lalu ke masyarakat dalam hal pembangunan imfrastruktur desa, kepala desa juga selalu memohon petunjuk dari dinas

terkait namun koordinasi yang dilakukan kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan belum sesuai dikarenakan kepala desa belum mampu memecahkan masalah dalam penetapan batas pembangunan infrastruktur desa dan pemberian pendapat untuk ketepatan waktu membayar lahan pembangunan infrastruktur desa hal dapat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan infrastruktur desa, kepala desa juga belum mampu memediasi permasalahan seperti dalam penetapan batas pembangunan infrastruktur desa yang ada selama pelaksanaan pembangunan akhirnya dalam memberikan pendapat terjadi tumpang tindih.

2. Koordinasi

Koordinasi antara kepala desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dalam pembangunan desa koordinasi antara kepala desa dan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat sangatlah dibutuhkan dikarenakan tanpa adanya koordinasi pembangunan yang ada di desa tidak akan berjalan sesuai harapan, maka dari itu kepala desa harus berkoordinasi dengan baik dengan pelaksana pembangunan agar pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat.

Hasil penelitian dilihat dari Koordinasi menunjukkan bahwa kepala desa melakukan koordinasi dengan cara berjenjangan dari pelaksana pembangunan lalu ke masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur desa, kepala desa juga selalu memohon petunjuk dari dinas terkait namun koordinasi yang

dilakukan kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan belum sesuai dikarenakan kepala desa belum mampu memecahkan masalah dalam penetapan batas pembangunan infrastruktur desa dan pemberian pendapat untuk ketepatan waktu membayar lahan pembangunan infrastruktur desa hal dapat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan infrastruktur desa, kepala desa juga belum mampu memediasi permasalahan seperti dalam penetapan batas pembangunan infrastruktur desa yang ada selama pelaksanaan pembangunan akhirnya dalam memberikan pendapat terjadi tumpang tindih.

3. Kerjasama

Kerjasama yang harus dilaksanakan oleh kepala desa. Dalam pembangunan desa kerja sama sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan tanpa adanya kerja sama pembangunan desa tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita maka dari itu kerja sama antara kepala desa dan pihak pelaksana pembangunan harus terjalin dengan baik.

Hasil penelitian dilihat dari kerja sama menunjukkan bahwa kepala desa dan pihak pelaksana pembangunan dalam hal pembersihan lahan pembangunan dan pengangkutan bahan-bahan yang di perlukan selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dengan pelaksana pembangunan serta masyarakat setempat dalam hal pembangunan infrastruktur desa namun kenyataannya kerja sama yang dilakukan kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan masih kurang dikarenakan kepala desa

kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sering tidak pernah hadir di lokasi pembangunan infrastruktur desa dan kepala desa juga kurang berperan aktif dalam pekerjaan selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Kerja sama kepala desa dan pihak pelaksana pembangunan dalam hal perencanaan dan pembangunan infrastruktur desa seperti dalam menyediakan berbagai macam bahan-bahan yang diperlukan selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa masih kurang dan tidak dapat menunjang keberhasilan pembangunan yang ada di desa Tolondadu II yang menyebabkan pembangunan infrastruktur desa yang tidak berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan tentang Kemampuan Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tolondadu II Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Komunikasi yang saat ini dilakukan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat dalam hal memediasi permasalahan belum sesuai dengan yang diharapkan dalam keberhasilan pembangunan dikarenakan kepala desa belum bisa memediasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan.

2. Koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat untuk menunjang keberhasilan pembangunan belum sesuai dengan yang di harapkan dikarenakan terjadi tumpang tindih dalam memberikan pendapat.
3. Kerja sama yang dilakukan oleh kepala desa dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat belum berjalan dengan baik dikarenakan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur desa yang tidak berkelanjutan.
4. Komunikasi, koordinasi dan Kerja sama yang dilakukan oleh kepala desa itu belum sesuai harapan masyarakat dikarenakan kepala desa belum mampu memediasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya komunikasi antara kepala desa dan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat harus ditingkatkan, serta kepala desa juga harus mampu meningkatkan pengetahuan dalam hal memediasi permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Perlunya koordinasi kepala desa dalam memecahkan masalah yang

ada untuk pelaksanaan pembangunan agar supaya pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

3. Perlunya kerja sama kepala desa untuk bekerja sama dengan pihak pelaksana pembangunan serta masyarakat agar pembangunan yang ada di desa akan berjalan dengan baik seperti yang di harapkan.
4. Sebaiknya kepala desa harus memiliki kemampuan dalam mediasi permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan imfrastruktur desa sehingga tercipta komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Fauzi, Johan Arifin. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Bernadine R, Wirjana dan Susilo Supardo. 2006. *Kepemimpinan, Dasar-Dasar Pengembangannya*. Yoyakarta: Andi Offset.
- Binoto Tjokroamidjojo, Iskandar Putong, Northouse, Walidun Husain. 2011. *Pengertian Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Marbun, B.N. 2006. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dessler, J.L, Ivancevich, J.M., dan Donnely Jr., J.H. 2006. *Organisasi Dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses*. Penterjemah :Djoerban Wahid. Jakarta : Erlangga
- Friedman, 2008. *Definisi Menurut Para Ahli, Konsef, Struktur* (Ahli Bahasa). Jakarta: EGC
- Gomes, Faustion Cardoso., 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi aksara.
- Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. 2013. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- L. Bayas dan W. Rue. 2005. *Human Resources*. McGraw Hill. New York.
- Mcclelland, 2009. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nawawi, 2006. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rivai & Ahmad, 2009. *Performance appraisal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prehallindo.
- Safi'i, H.M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Setiawan Guntur. 2010. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Sihotang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- Sudarmanto. 2009. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UBPress.
- Tjokromidjojo. 2011. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Thomas S. Bateman dan Scott A. Snell. 2004. *Human Resources*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin .2010. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta: Bintang Pustaka.
- Wibowo. 2007. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, Tentang Pemerintah Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.